

LAPORAN MONEY RENCANA AKSTAHUN 2025
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	PENTAHAPAN TARGET				PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	AKSI	JADWAL PELAKSANAAN				JADWAL PELAKSANAAN				JADWAL PELAKSANAAN				JADWAL PELAKSANAAN				Anggaran	Realisasi	Catatan Hasil Monv	Tindak lanjut	Penanggung jawab
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					B1	B2	B3	Realisasi	B4	B5	B6	Realisasi	B7	B8	B9	Realisasi	B10	B11	B12	Realisasi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				13				14				15				16	17	18	19	20
Meningkatnya pemerataan infrastruktur	1. Rasio Konektivitas Transportasi	0,634 Rasio					Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio kejadian kecelakaan transportasi per 1 juta keberangkatan	14,23			5%	10,77%	15,77%	23,92%	3%	3,39%	30,31%	9,93%	9,92%	0,13%	50,29%	0,17%	9,14%	14,99%	59,60%	18,476,652,810				
			25%	25%	25%	25%	1. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Persentase Meningkatnya Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	40%			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	Efisiensi Anggaran		
							Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	1 Dokumen	Persiapan Proses Lelang Pelaksanaan Kegiatan Serah Terima Hasil Pekerjaan		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	Efisiensi Anggaran		Angkutan	
							2. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Meningkatnya Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	70%			5%	5%	10%	15%	5%	10%	30%	10%	10%	0%	50%	0%	45%	5%	100%	228,730,000	206,472,900			
			25%	25%	25%	25%	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	Persiapan Lelang Masa Pelaksanaan Pekerjaan Serah Terima Hasil Pekerjaan		5%	5%	10%	15%	5%	10%	30%	10%	10%	0%	50%	0%	45%	5%	100%	228,730,000	206,472,900			Pelayaran
							Program Pengelolaan Pelayaran	Jumlah Trip Perjalanan Kapal	3,856 Trip			5,29%	5,45%	10,74%	16,35%	5,16%	9,05%	30,56%	9,62%	9,96%	0,63%	50,77%	0,56%	16,24%	32,43%	100,00%	11,621,507,500	10,922,907,960			
							1. Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) / Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP), Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan yang memiliki RIP dan DLKR/DLKP	1 Pelabuhan			5%	5%	10%	15%	5%	10%	30%	10%	10%	0%	50%	0%	0%	50%	100%	952,040,000	947,433,033			
			25%	25%	25%	25%	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) / Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) / Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Dokumen	Persiapan Lelang Masa Pelaksanaan Pekerjaan Serah Terima Hasil Pekerjaan		5%	5%	10%	15%	5%	10%	30%	10%	10%	0%	50%	0%	0%	50%	100%	952,040,000	947,433,033			Pelayaran
							2. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Pelabuhan			5%	5,22%	10,22%	15,65%	4,35%	10%	30%	10,24%	9,94%	0,57%	50,75%	0,00%	14,91%	34,34%	100,00%	8,669,720,000	8,110,088,797			
			25%	25%	25%	25%	-Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Dokumen	Persiapan Lelang Masa Pelaksanaan Pekerjaan Serah Terima Hasil Pekerjaan		5%	5%	10%	20%	58%	0%	78%	2%	0%	17%	97%	0%	1%	3%	100%	53,320,000	50,571,389			UPTD PASDPL
			25%	25%	25%	25%	-Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Pelabuhan	Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Pengadaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan dan Pelayanan Proses Rencana Induk Pelabuhan (RIP)		5%	5%	10%	15%	5%	10%	30%	10%	10%	0%	50%	0%	15%	35%	100%	7,925,000,000	7,376,769,165			TAA
							3. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	1 Unit			5%	5%	10%	15%	8,73%	6,27%	30%	10%	10%	3,63%	53,63%	9,42%	2,61%	34,34%	100%	696,095,000	659,467,934			
			25%	25%	25%	25%	-Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang melayani trayek lintas daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang melayani trayek lintas daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	1 Dokumen	Persiapan Lelang Masa Pelaksanaan Pekerjaan Serah Terima Hasil Pekerjaan		5%	5%	10%	15%	5%	10%	30%	10%	10%	0%	50,00%	0%	48%	2%	100%	191,365,000	175,039,750			Pelayaran
			25%	25%	25%	25%	- Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang melayani trayek antar Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang melayani trayek antar Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	Persiapan Proses Lelang Pelaksanaan Pekerjaan Serah Terima Hasil Pekerjaan		5%	5%	10%	15%	5%	10%	30%	10%	10%	5%	55,00%	13%	12%	20%	100%	504,730,000	484,428,184			UPTD PASDPL
							Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio kejadian kecelakaan transportasi per 1 juta keberangkatan	14,23			5%	10,77%	15,77%	23,92%	3%	3,39%	30,31%	9,93%	9,92%	0,13%	50,29%	0,17%	9,14%	40,40%	100%	16,407,902,510	12,238,750,824			
							1. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang dikelola	7 Terminal			5%	5%	10%	15%	5%	10%	30%	10%	10%	0%	50%	0%	13,9%	36%	100%	7,456,000,000	6,855,858,570			
			25%	25%	25%	25%	-Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang dilakukan Pengembangan	4 Terminal	Persiapan dan Lelang Pelaksanaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan		5%	5%	10%	15%	5%	10%	30%	10%	10%	0%	50%	0%	15%	35%	100%	6,908,500,000	6,327,656,564			UPTD Terminal
			25%	25%	25%	25%	-Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang dilakukan Rehabilitasi	4 Terminal	Persiapan Proses Lelang Pelaksanaan Pekerjaan dan Serah terima hasil Pekerjaan		5%	5%	10%	15%	5%	10%	30%	10%	10%	0%	50%	25%	15%	10%	100%	547,500,000	528,202,006			UPTD Terminal

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	PENTAHAPAN TARGET				PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	AKSI	JADWAL PELAKSANAAN				JADWAL PELAKSANAAN				JADWAL PELAKSANAAN				JADWAL PELAKSANAAN				Anggaran	Realisasi	Catatan Hasil Monv	Tindak lanjut	Penanggung jawab		
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					B1	B2	B3	Realisasi	B4	B5	B6	Realisasi	B7	B8	B9	Realisasi	B10	B11	B12	Realisasi							
							Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase meningkatnya pelayanan urusan pemerintah daerah provinsi	90%	Persiapan dan Pemilihan Penyedia Pelaksanaan dan Memonitoring Evaluasi		6%	6,73%	12,73%	19%	14,51%	9,52%	43,03%	2,62%	5,98%	0,14%	51,77%	9,11%	8,56%	30,56%	100%	42,285,846,437	37,040,184,299			Sekretariat		
							Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio kejadian kecelakaan transportasi per 1 juta keberangkatan	14,23 Rasio		5%	10,77%	15,77%	23,92%	3%	3,39%	30,31%	9,93%	9,92%	0,13%	50,29%	0,17%	9,14%	40,40%	100%	16,407,902,510	12,238,750,824						
			25%	25%	25%	25%	1. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Meningkatnya Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	80%		6,17%	3,83%	10%	19,17%	4,72%	6,11%	30%	10%	10%	0%	50%	9%	3%	38%	100%	250,000,000	149,460,980						
							- Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Jumlah ASN yang memiliki kompetensi Auditor dan Inspektur LLAJ	8 Orang	Persiapan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan		12%		10%	15%	5%	10%	30%	10%	10%	0%	50%	0%	0%	0%	50%	100,000,000				Angkutan		
			25%	25%	25%	25%	-Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	1 Laporan	Persiapan Pelaksanaan Inspeksi, Audit, dan Pemantauan Pelaporan Hasil Kegiatan		5%	5%	10%	25%	5%	0%	30,00%	10%	10%	15%	65,00%	0%	5%	30%	100%	150,000,000	149,460,980			UPTD Terminal		
			25%	25%	25%	25%	-Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	1 Laporan	Persiapan Pelaksanaan Tingkat Provinsi Pelaksanaan Tingkat Nasional		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	Efisiensi Anggaran		Angkutan			
			2. Rata - rata load factor angkutan umum		71%				Program Pengelolaan Perkeretaapian	Jumlah Penumpang Keretaapi	1.517.236 Orang			5%	5%	10%	15%	5%	10%	30%	10%	10%	0%	50%	0%	15,53%	34%	100%	518,858,550	445,771,511			
									1. Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang jaringannya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Panjang Jaringan Jalur Keretaapi yang menjadi kewenangan provinsi	24 km			5%	5%	10%	15%	5%	10%	30%	10%	10%	0%	50%	0%	15%	35%	100%	358,497,000	334,843,852			
					100%				- Sosialisasi dan Uji coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang jaringannya Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang jaringannya Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Persiapan dan Koordinasi Kegiatan Kampanye/Sosialisasi Keselamatan di Perlintasan Sebandang dan Pelatihan PIL Penyusunan Laporan		5%	5%	10%	15%	5%	10%	30%	10%	10%	0%	50%	0%	15%	35%	100%	358,497,000	334,843,852			Keretaapi
									2. Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Panjang Jaringan Jalur Keretaapi yang menjadi kewenangan provinsi	24 km			5%	5%	10%	15%	5%	10%	30%	10%	10%	0%	50%	0%	10%	40%	100%	106,493,650	69,464,911			
								100%	- Sosialisasi dan Uji coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Persiapan dan Koordinasi Kegiatan Kampanye/Sosialisasi Pengguna Transportasi Massal Penyusunan Laporan		5%	5%	10%	15%	5%	10%	30%	10%	10%	0%	50%	0%	15%	35%	100%	106,493,650	69,464,911			Keretaapi
									Program Pengelolaan Pelayaran	Jumlah Trip Perjalanan Kapal	3,856 Trip			5,20%	5,45%	10,74%	16,35%	5,16%	9,05%	30,56%	9,62%	9,96%	0,63%	50,77%	0,56%	16,24%	32,43%	100%	11,653,737,500	10,922,907,960			
					1. Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antarDaerah Kabupaten / Kota dalam daerah Provinsi yang Bersangkutan	Jumlah Angkutan Sungai dan Danau untuk kapal yang melayani trayek kewenangan provinsi dalam sistem pelayanan perlintasan bususaha terintegrasi secara elektronik yang memenuhi syarat perlintasan	1 Unit			5%	5%	10%	15%	5%	10%	30%	10%	10%	0%	50%	0%	35%	15%	100%	638,997,500	600,724,424							
	25%	25%	25%	25%	-Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek kewenangan provinsi dalam sistem pelayanan perlintasan bususaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perlintasan Bususaha Terintegrasi Secara Elektronik yang tersedia	1 Dokumen	Persiapan Lelang Masa Pelaksanaan Pekerjaan Serah Terima Hasil Pekerjaan		5%	5%	10%	15%	5%	10%	30%	10%	10%	0%	50%	0%	35%	15%	100%	638,997,500	600,724,424			Pelayaran				
					2. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pungpunan Regional	Jumlah Pelabuhan Pungpunan Regional	1 Pelabuhan			5%	5,22%	10,22%	15,65%	6,06%	9,03%	30,74%	9,5%	9,94%	0,57%	50,75%	0,0%	14,91%	34,34%	100%	8,669,720,000	8,110,088,197							
	25%	25%	25%	25%	- Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pungpunan Regional	Jumlah Pelabuhan Pungpunan Regional yang dipelihara	1 Pelabuhan	Peningkatan Pelayanan BLUD dari Segi Waktu Pemeliharaan dan Pelayanan Proses Pengadaan BLUD		5%	5%	10%	20%	15%	35%	35%	5%	10%	5%	55%	0%	15%	30%	100%	791,400,000	682,747,643			Pelayaran				
					Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio kejadian kecelakaan transportasi per 1 juta keberangkatan	14,23		5%	10,77%	15,77%	23,92%	3%	3,39%	30,31%	9,93%	9,92%	0,13%	50,29%	0,17%	9,14%	40,40%	100%	16,407,902,510	12,238,750,824								
							1. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penyediaan Angkutan Umum	6 Unit			5%	5%	10%	15%	6,43%	9,71%	31,14%	9,72%	9,71%	0,76%	51,33%	1,5%	0,27%	46,90%	100%	1,862,500,000	233,911,190					
							-Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk jasa Angkutan Orang dan / atau Barang Antar kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk jasa Angkutan Orang dan / atau Barang Antar kota dalam 1 (satu) Provinsi	1 Laporan	Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Laporan Kegiatan		5%	5%	10%	15%	55%	0%	70%	0%	0%	0%	70%	12%	3%	15%	100%	165,000,000	132,099,337			Angkutan		
			25%	25%	25%	25%	- Penyediaan Angkutan Umum untuk jasa Angkutan Orang dan / atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Umum untuk jasa Angkutan Orangdan / atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2 Unit	Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Laporan Kegiatan		5%	5%	10%	15%	6,43%	9,71%	31,14%	8,86%	10%	0%	50%	2,83%	0%	47%	100%	1,697,500,000	101,811,853			Angkutan		

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	PENTAHAPAN TARGET				PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	AKSI	JADWAL PELAKSANAAN				JADWAL PELAKSANAAN				JADWAL PELAKSANAAN				Anggaran	Realisasi	Catatan Hasil Movev	Tidak lanjut	Penanggung jawab				
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					B1	B2	B3	Realisasi	B4	B5	B6	Realisasi	B7	B8	B9	Realisasi						B10	B11	B12	Realisasi
					2. Penetapan Kawasan Perkotaan Untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Meningkatnya Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	40%					0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0	Efisiensi Anggaran				
	25%	25%	25%	25%	Sosialisasi Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Persiapan				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	Efisiensi Anggaran		Angkutan	
					3. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antar Kota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Meningkatnya Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	40%				5%	5%	10%	15%	5%	10%	30%	10%	10%	0%	50%	0%	40%	10%	100%	405,000,000	356,545,855				
	25%	25%	25%	25%	- Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Persiapan				5%	5%	10%	15%	5%	10%	30%	10%	10%	0%	50%	0%	40%	10%	100%	405,000,000	356,545,855			Angkutan
					4. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Meningkatnya Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	52%					5%	5%	10%	15%	5%	10%	30%	10%	10%	0%	50%	20%	20%	10%	100%	142,340,000	97,833,180			
	25%		25%	25%	- Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Peningkatan aplikasi ke versi yang lebih baru terkait penambahan fitur, peningkatan kinerja, atau penyesuaian dengan sistem operasi terbaru dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	Persiapan				5%	5%	10%	15%	5%	10%	30%	10%	10%	0%	50%	20%	20%	10%	100%	142,340,000	97,833,180			Angkutan
					Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio kejadian kecelakaan transportasi per 1 juta keberangkatan	14,23				5%	10,77%	15,77%	23,92%	3%	3,39%	30,31%	9,93%	9,92%	0,13%	50,29%	0,17%	9,14%	40,40%	100%	16,407,902,510	12,238,750,624				
					1. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Persentase terlaksananya pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas	80%				5,78%	4,22%	10%	15,56%	5,24%	9,20%	30%	10%	10%	0%	50%	0%	0,80%	49%	100%	562,000,800	379,214,912				
	25%	25%	25%	25%	- Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	1 Laporan	Menyapkan SK, SPT, Daftar Hadir				5%	5%	10%	15%	5%	10%	30%	10%	10%	0%	50%	20%	20%	10%	100%	472,000,800	337,557,682			Angkutan
					Program Pengelolaan Pelayanan	Jumlah Trip Perjalanan Kapal	3,856 Trip				5,29%	5,45%	10,74%	16,35%	5,16%	9,05%	30,56%	9,62%	9,96%	0,63%	50,77%	0,56%	16,24%	32,43%	100%	11,653,737,500	10,922,907,960				
					1. Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Persentase Meningkatnya Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	70%				5%	5%	10%	15%	5%	10%	30%	10%	10%	0%	50%	10%	5%	35%	100%	108,155,000	97,810,299				
	25%	25%	25%	25%	- Fasilitas pemenuhan persyaratan perolehan izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang jasa pengurusan transportasi angkutan perairan pelabuhan penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut tali mandiri dan depo peti kemas dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	Persiapan Pekerjaan (Menyapkan SK,SPT dan Matrik Kegiatan			5%	5%	10%	15%	5%	10%	30%	10%	10%	0%	50%	10%	5%	35%	100%	108,155,000	97,810,299			Pelayaran	
					2. Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Persentase Meningkatnya Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	35%				5%	5%	10%	15%	5%	10%	30%	10%	10%	0%	50%	0%	35%	15%	100%	360,000,000	300,912,173				
	25%	25%	25%	25%	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan	Persiapan			5%	5%	10%	15%	5%	10%	30%	10%	10%	0%	50%	0%	35%	15%	100%	360,000,000	300,912,173			Pelayaran	
					Program Perkeretaapian	Jumlah Penumpang Keretaapi	1.517,236 Orang				5%	5%	10%	15%	5%	10%	30%	10%	10%	0%	50%	0%	15,53%	3447%	100%	518,858,550	445,771,511				
					1. Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Melebihi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Izin Keretaapi khusus	1 Dokumen				5%	5%	10%	15%	5%	10%	30%	10%	10%	0%	50%	0%	30%	20%	100%	53,867,900	41,462,748				
			100%		-Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Merjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Merjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	Sinkronisasi Data			5%	5%	10%	15%	5%	10%	30%	10%	10%	0%	50%	0%	30%	20%	100%	53,867,900	41,462,748			Keretaapi	
							Penyusunan Laporan																								

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025	PENTAHAPAN TARGET				PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	AKSI	JADWAL PELAKSANAAN				JADWAL PELAKSANAAN				JADWAL PELAKSANAAN				JADWAL PELAKSANAAN				Anggaran	Realisasi	Catatan Hasil Monev	Tindak lanjut	Penanggung jawab		
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					B1	B2	B3	Realisasi	B4	B5	B6	Realisasi	B7	B8	B9	Realisasi	B10	B11	B12	Realisasi							
Menurunnya Kejenuhan Arus Lalu Lintas	3. V/C Ratio Jalan Provinsi	0,390 Rasio					Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio kejadian kecelakaan transportasi per 1 juta keberangkatan	14,23			5%	10,77%	15,77%	23,92%	3%	3,39	30,31%	9,93%	9,92%	0,13%	50,29%	0,17%	9,14%	40,40%	100%	16,407,902,510	12,238,750,824					
							1. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penyediaan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	2 Unit			5%	5%	10%	15%	6,43%	9,71%	31,14%	9,72%	9,71%	0,76%	51,33%	1,5%	0,27%	46,90%	100%	1,862,500,000	233,911,190					
				50%	25%	25%	- Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Provinsi		2 Unit	Penyiapan Dokumen KAK, HPS, Gambar Teknis dan Spesifikasi Teknis																							
										Menyerahkan dokumen - dokumen untuk proses pelelangan																							
										Proses Pelelangan		5%	5%	10%	15%	5%	10%	30%	10%	10%	0%	50%	0%	5%	45%	100%	5,702,161,710	4,165,926,137				Lalu Lintas	
										Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan																							
										Pemeriksaan dan Serah Terima Pekerjaan																							
										Proses Pembayaran																							
							2. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Titik Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	4 Titik			5,78%	4,22%	10%	15,56%	5,24%	9,20%	30%	10%	10%	0%	50%	0%	0,80%	49%	100%	562,000,800	379,214,912					
			25%	25%	25%	25%	-Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	1 Laporan	1. Menyajikan dokumen, SK Panitia, Surat Undangan, dan Bahan Rapat			12%	3%	15%	20%	5%	5%	30%	10%	10%	0%	50%	0%	5%	45%	100%	90,000,000	41,657,230				Lalu Lintas
										2. Pelaksanaan Kegiatan Forum Lalu Lintas																							
										3. Pembuatan Notulen Hasil Rapat																							
							3. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Persentase Meningkatnya Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	33%			5%	5%	10%	15%	5%	10%	30%	10%	10%	0%	50%	0%	0%	0%	50%	27,900,000	-	Efisiensi Anggaran				
				25%	25%	50%	-Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Pengawasan Andalalin	1 Laporan	1. Melakukan Inventarisasi terhadap Dokumen Andalalin yang sudah dikeluarkan			5%	5%	10%	15%	5%	10%	30%	10%	10%	0%	50%	0%	0%	0%	50%	27,900,000	-	Efisiensi Anggaran			Lalu Lintas
										2. Melakukan Inventarisasi terhadap bangunan / gedung / pusat kegiatan yang sudah atau belum memiliki andalalin																							

PALEMBANG, 3 Januari 2026

KEPADA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Drs. H. ARINARSA JS
Kepala Dinas Utama Madya (IV/d)
NIP. 19710603 199101 1 002